

Anggota DPR dan Keluarganya Mulai Divaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM) - Anggota DPR RI beserta keluarga mulai divaksinasi Covid-19. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

"Ya infonya (mulai divaksinasi)," kata Aziz saat diminta konfirmasi wartawan, Rabu (24/2).

Azis belum memberi informasi lanjutan sejak kapan vaksinasi COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarga. Aziz mengarahkan informasi lengkap vaksinasi COVID-19 anggota DPR dan keluarga ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR.

"Cek di Kesekjenan (DPR)," ujar Aziz.

Seperti diketahui, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air

masuk tahap kedua. Presiden Jokowi mengatakan vaksinasi tahap kedua untuk pekerja publik dan pelayan publik yang dimulai di DKI Jakarta ini akan dilanjutkan di provinsi lain.

Dalam memantau proses vaksinasi Covid-19, Jokowi mengatakan proses berjalan lancar.

Dia menyebut manajemen lapangan saat vaksinasi dilakukan dengan baik.

"Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang, tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik, manajemen lapangan sangat baik," kata Jokowi setelah meninjau proses vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2). ● han

Gunung Merapi Kembali Luncurkan Awan Panas

SLEMAN (IM) — Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas pada Rabu (24/2) pagi. Awan panas diikuti guguran lava pijar.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Hanik Humaida, menuturkan, awan panas teramati pukul 06.31 WIB.

"Dengan jarak luncur 800 meter ke arah barat daya, durasi 88 detik dan amplitudo 31 mm," ujarnya.

Gunung Merapi juga muntahkan empat kali lava pijar dengan jarak luncur maksimum 800 meter ke arah yang sama. Sementara pada periode pengamatan sebelumnya yakni pukul 00.00 WIB-06.00 WIB, teramati lava pijar sebanyak tiga kali dengan jarak luncur maksimum 700 meter ke arah yang sama.

Luncuran awan panas ini pertama kali terjadi setidaknya dalam tiga pekan terakhir. Awan panas terakhir dimuntahkan pada 28 Januari lalu dengan jarak luncur 2 km ke arah barat daya selama 175 detik dan amplitudo 69 mm.

Sehari sebelumnya, Selasa (23/2) BPPTKG mencatat Gunung Merapi mengeluarkan 12 kali guguran lava dengan jarak maksimum 1,2 km. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan Senin (22/2) ketika terjadi 36 kali guguran lava.

Rabu (24/2) dari pukul 00.00 WIB-12.00 WIB, BPPTKG mencatat terjadi satu gempa awan panas guguran, 88 gempa guguran, dua gempa hembusan, satu gempa fase banyak dan satu gempa tektonik jaih. Dengan tingkat aktivitas ini, status Gunung Merapi masih Siaga. ● mei



IDN/ANTARA

ASET ASABRI DI BOYOLALI

Seorang wartawan memotret suasana kantor garasi bus Restu Wijaya di Simo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (24/2). Kejaksan Agung (Kejagung) menyita aset sebanyak 17 unit bus milik PT Restu Wijaya pada Selasa (23/2) malam, terkait dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.

Wow, Edhy Prabowo Beli 8 Sepeda Ratusan Juta Rupiah dari Uang Staf Istrinya

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Staf Khusus (Stafus) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Safri.

Safri dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih bening (benur) lobster. Safri bersaksi untuk terdakwa Suharjito.

Dalam persidangan, Safri mengaku pernah mendapat perintah dari Edhy Prabowo, melalui Sekretaris Pribadinya, Amirul Mukminin, untuk membeli delapan sepeda. Delapan unit sepeda itu, akhirnya dibeli Safri menggunakan uang dari Ainul Faqih. Ainul Faqih sendiri merupakan staf istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi.

"Secara langsung pak menteri yang perintah kepada Amirul yang meminta, karena beli sepeda itu susah nyarinya. Terus dia (Amirul) bilang mau beli sepeda pak, 8 biji. Oh ya saya bilang ada nanti ada teman saya yang bisa nyari," ungkap Safri saat bersaksi secara virtual yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (24/2).

Jaksa kemudian mengonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Safri soal adanya aliran uang dari rekening Ainul Faqih sebesar Rp168,4 juta. Dalam BAP Safri, uang Rp168,4 juta itu digunakan untuk membeli delapan unit sepeda. Di mana, harga 1 unit sepeda yang dibeli Safri sekira Rp14 juta. "Sejumlah Rp168 juta pada Agustus 2020 dari rekening Ainul Faqih digunakan untuk beli delapan unit sepeda seharga Rp14,8 juta per unit," beber Jaksa saat

membacakan BAP Safri. "Atas perintah Edhy Prabowo, saudara Edhy pada saat itu memerintahkan saya untuk mencari sepeda untuk ditaruh di rumah Widya Chandra. Bahwa sisanya uang sebesar Rp48 juta saya gunakan untuk membeli satu buah HP Samsung," sambung Jaksa.

Safri pun mengamini pernyataannya tersebut yang tertuang dalam BAP. "Seingat saya seperti itu," kata Safri menjawab Jaksa. Dalam perkara ini, pemilik sekaligus Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito didakwa telah menyuap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebesar 103.000 dolar AS atau setara Rp1,4 miliar dan Rp706.055.440 (Rp706 juta). Total keseluruhan suap yang diberikan Suharjito untuk Edhy Prabowo tersebut ditaksir mencapai Rp2,1 miliar.

Suap sebesar Rp2,1 miliar itu disebut-sebut untuk mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP). Atau dengan kata lain, suap itu untuk memuluskan PT DPPP memperoleh izin ekspor benih lobster (benur). Uang suap itu disinyalir ditampung Edhy Prabowo melalui rekening orang lain. Salah satu rekening yang diduga menjadi tempat penampungan uang suap Edhy Prabowo yakni milik Ainul Faqih. Ainul Faqih sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Jokowi Disambut Kerumunan di NTT, Istana: Itu Spontanitas Masyarakat

Kerumunan warga saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Maumere NTT, terjadi spontan. Saat itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya protokol kesehatan.

JAKARTA (IM) — Kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kemarin menimbulkan kerumunan. Kerumunan terjadi pada saat rombongan Presiden Jokowi ada di Maumere NTT, Rabu (24/2).

Dalam video yang banyak beredar dimedia sosial, terlihat iring-iringan Presiden Jokowi disambut kerumunan warga. Nampak presiden melambatkan tangan dari atas mobil kepada masyarakat yang berusaha mendekati mobil yang membawa Kepala Negara.

"Benar itu video di Mau-

mere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa (23/2).

"Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," lanjutnya.

Bey mengatakan, kejadian tersebut merupakan bentuk spontanitas dan antusias masyarakat Maumere menyambut

kedatangan Presiden Jokowi. Menurutnya pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya protokol kesehatan.

"Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden ataupun dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," jelasnya.

Terkait pembagian suvenir, Bey mengatakan itu bentuk penghargaan Presiden terhadap antusiasme masyarakat. Namun dia menegaskan bahwa Presiden tetap mengingatkan untuk menaati protokol kesehatan.

"Itu spontanitas presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat, suvenirnya

itu buku, kaus dan masker. Tapi poinnya, Presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan," tandasnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat untuk meminimalisir risiko penularan.

"Pada intinya untuk masyarakat mohon terus mengingat di masa pandemi ini harus senantiasa meminimalisir risiko penularan," kata Wiku, Rabu (24/2).

Wiku juga meminta pos-

komando (posko) penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan dapat mengantisipasi hal-hal seperti ini. Seperti diketahui dalam pelaksanaan PPKM Mikro, setiap desa dan kelurahan diminta untuk membentuk posko.

Tugasnya adalah koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro. Dimana Posko diketahui oleh kepala desa ataupun lurah.

"Dimohon juga posko desa/kelurahan dapat melakukan antisipasi terkait hal-hal ini," tuturnya. ● han

DPP Partai Demokrat, Demokrat Belum Pecat Kader "Penghianat"

JAKARTA (IM) — DPP Partai Demokrat hingga kini belum melakukan tindakan apa-apa terhadap kader yang dianggap sebagai "penghianat" karena akan menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Istisna itu disebutkan sebagai gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) oleh beberapa kader di internal Partai Demokrat dan tokoh eksternal atau di luar Partai Demokrat. Nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat disebut-sebut salah satu tokoh eksternal di balik rencana penggulingan AHY.

"Memang kader-kader militan dari seluruh Indonesia, para pemilik suara yang sah, sudah mendesak terus juga agar para pelaku GPK PD yang masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat, untuk dipecaat segera," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (24/2).

Dikatakan Herzaky, para kader Demokrat yang loyal pada dasarnya tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih suka atap dengan mereka. Untuk itu, mereka meminta para pengkhianat tersebut untuk dibersihkan dari Partai Demokrat.

"Karena mereka, kader-kader militan dan para pemilik suara sah ini, tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketum AHY yang sudah menuai hasil sangat baik selama sebelas bulan terakhir, dinodai oleh kader-kader pengkhianat yang malah tidak punya peran sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat selama setahun terakhir," paparnya.

Herzaky menjelaskan, tentunya aspirasi para kader dan pemilik suara sah ini benar-benar disimak oleh Ketum, Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Dewan Kehormatan, maupun Mahkamah Partai. Bagaimanapun, pengurus Demokrat akan menegakkan hukum yang berlaku di internal partai.

"Ada aturan dan mekanisme untuk para pengkhianat yang berkomploit dengan pihak eksternal dalam usaha mengambil alih kepemimpinan ini secara paksa," ujar Herzaky.

Karena itu, dia menegaskan bahwa sanksi tegas sudah pasti akan diberikan kepada siapapun yang terlibat. Namun apa sanksinya, pihaknya akan segera memutuskan.

"Pemecatan memang sanksi terberat yang akan kami berikan. Tunggu saja infonya dalam beberapa hari ke depan. Keputusannya akan keluar," pungkas Herzaky. ● han

KPK Kembali Perpanjang Penahanan Mantan Anggota DPRD Jabar

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang penahanan mantan anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim. Rozaq merupakan tersangka korupsi pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019.

"Tim penyidik KPK kembali memperpanjang masa penahanan tersangka ARM (Abdul Rozaq Muslim) berdasarkan Penetapan Ketua

PN Bandung selama 30 hari kedepan," kata Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2).

Ali mengatakan, perpanjangan penahanan terhitung sejak 25 Februari 2021 sampai 26 Maret 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

"Penyidik akan terus melengkapi berkas perkara penyidikan dengan memanggil para saksi yang terkait dengan perkara ini," ucap Ali. ● han

Dirut Utama Karya Aspal Beton Diperiksa Penyidik KPK Terkait Suap Wali Kota Cimahi

JAKARTA (IM) — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Utama Karya Aspal Beton, Dindin Solahudin, terkait kasus suap dalam kasus dugaan suap perizinan RSU Kasih Bunda di Kota Cimahi TA 2018-2020.

Dindin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AJM," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/2). Sebenarnya Dindin sudah dipanggil penyidik KPK pada 4 Januari lalu. Namun, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit.

Sebelumnya Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM) telah ditetapkan sebagai sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap sekira Rp1,6 miliar untuk memuluskan perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi.

Ajay disinyalir menerima Rp1,6 miliar dalam lima kali tahapan. Uang senilai Rp1,6

miliar yang diterima Ajay itu, diduga bagian dari kesepakatan awal untuk memuluskan izin pembangunan RSU Kasih Bunda sebesar Rp3,2 miliar.

Selain Ajay, KPK juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni, Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi, Hutama Yonathan (HY). Hutama Yonathan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Awalnya, Ajay diduga meminta jatah kepada Hutama Yonathan sebesar Rp3,2 miliar untuk mengurus izin pembangunan penambahan Gedung RSU Kasih Bunda Cimahi. Hutama Yonathan kemudian menyanggupi permintaan Ajay tersebut.

Uang sebesar Rp3,2 miliar itu diminta Ajay saat bertemu dengan Hutama di sebuah restoran daerah Bandung. Akhirnya, uang yang telah disepakati itu akan diserahkan secara bertahap oleh salah satu staf keuangan di RSU Kasih Bunda kepada Ajay melalui orang kepercayaan.

"Untuk menyamakan adanya pemberian uang kepada

AJM tersebut, pihak RSU KB membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Sabtu 28 November 2020.

Atas ulahnya, sebagai penerima suap, Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pemberi suap, Hutama Yonathan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ● han



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN MELIA BOENTARAN

Tersangka Direktur PT ANN Melia Boentaran (tengah) berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/2). Melia Boentaran diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka dalam perkara menyuap sejumlah pejabat termasuk Bupati Bengkalis untuk bisa mendapatkan pengerjaan Proyek Multi Years Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu, Siak Kecil, Bengkalis Tahun 2013-2015.

PENGUMUMAN

Dalam Rilis Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SENTRAL TANI INDONESIA (Perseroan) berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang berita acaranya dibuat dengan akta tanggal 22 Februari 2021 Nomor : 17, dibuat oleh SULESTARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jambi, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan untuk pemberesan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah ditunjuk Likuidator.

Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 347 dan Pasal 349 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap segera membesarkan tagihan kepada Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dikantor PT SENTRAL TANI INDONESIA, KO Pergudangan Sunrise Bizpark, Jalan SS d/25-26, Kel. Kuta Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten, 15660.

Hormat kami,
Direksi

PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan tindakan konversi utang perseroan menjadi saham yang dilakukan dalam PT JKT MAKMUR INVESTASI sejumlah Rp12.000.000.000,- dan sejumlah Rp3.000.000.000,- telah selesai dilaksanakan dan penerbahan saham baru atas konversi tersebut diambil bagian oleh PT SURYA SELARAS GEMILANG.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 25 Februari 2021
DIREKSI
PT JKT MAKMUR INVESTASI
DIREKSI
SURYA SELARAS GEMILANG